



TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENGEMBANGAN BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS MELALUI PENDIRIAN INKUBATOR WIRAUSAHA DI WILAYAH II JAWA BARAT

Turasih^{1*}, Wakhit Hasim¹, Amelia Dwi Handayani¹, Suci Ramdaeni¹

¹Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Author email: turasih@syekhnurjati.ac.id

*Corresponding author

Article Info	Abstract
<p><i>Submit: Nopember 10th. 2024</i> <i>Accepted: December 15th. 2024</i> <i>Publish: December 30th. 2024</i></p> <p>Keyword: <i>BLK-K, Entrepreneurial Incubator, BLK-K Characteristics, BLK-K Opportunities and Challenges BLK-K</i></p> <p>Kata Kunci: <i>BLK-K, Inkubator Wirausaha, Karakteristik BLK-K, Peluang dan Tantangan BLK-K</i></p>	<p>Community Vocational Training Centers (BLK-K) are one of the backbones of unemployment alleviation through job creation and the creation of entrepreneurs capable of producing products or services. This study aims to analyze the characteristics, challenges, and opportunities of BLKK in 12 regencies/cities within Region II in West Java in their development through the establishment of entrepreneurial incubators. The study used a mixed method that combines qualitative and quantitative approaches. Primary resources were drawn from the direct BLK-K actors, the mentoring team, officers from the Bandung Center for the Acceleration and Expansion of Employment Opportunities, and related BLK-K/incubator tenants. Secondary data sources were drawn from literature reviews and various sources related to Community BLK and entrepreneurial incubators. Qualitative data collection methods were carried out through direct observation of several BLK K locations, interviews during mentoring, FGDs, and literature reviews. Meanwhile, the quantitative approach utilized a questionnaire instrument to obtain data on BLK-K attitudes towards external challenges and opportunities. The results showed that there are 23 BLK-K in 12 regencies in West Java that have developed and established entrepreneurial incubator institutions characterized by Islamic boarding school-based management. The main characteristics of the development of BLK-K into an entrepreneurial incubator are having a strategic plan for an entrepreneurial incubator, having a set of standard operating procedures (SOPs) as guidelines for activities, and having entrepreneurial tenants around the Islamic boarding school. In its development, BLK-K still faces challenges in the form of dependence on funding from the central government, limited cooperation with the business world and the industrial world, BLK-K management, training quality, instructor competence, location selection and vocational programs, and the continued resistance to change. However, there are opportunities that BLK-K can take advantage of, including increasing BLK-K capacity, multi-party collaboration, and the development of communication and information technology.</p>

Abstrak

Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK-K) menjadi salah satu tulang punggung pengentasan pengangguran melalui upaya penciptaan lapangan kerja dan mencetak wirausaha yang mampu menghasilkan produk atau jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik, tantangan dan peluang BLKK di 12 kabupaten/kota dalam Lingkup Wilayah II di Jawa Barat dalam pengembangannya melalui pendirian inkubator wirausaha. Penelitian menggunakan metode mix method yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sumber daya primer diambil dari pelaku langsung BLK-K, tim pendamping, petugas dari Balai Percepatan Perluasan Kesempatan Kerja Bandung, dan tenant BLK-K/inkubator yang terkait. Sumber data sekunder diambil dari kajian pustaka dan berbagai informasi terkait dengan BLK Komunitas dan inkubator wirausaha. Metode pengambilan data kualitatif dilakukan melalui observasi langsung terhadap beberapa lokasi BLK-K, wawancara saat pendampingan, FGD, dan kajian pustaka. Sedangkan pendekatan kuantitatif memanfaatkan instrumen angket untuk mendapatkan data kecenderungan sikap BLK K terhadap tantangan dan peluang eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 23 BLK-K di 12 Kabupaten di Jawa Barat yang telah berkembang dan mendirikan lembaga inkubator wirausaha yang memiliki karakteristik pengelolaan berbasis pesantren. Ciri utama perkembangan BLK-K menjadi inkubator wirausaha adalah memiliki rencana strategis inkubator wirausaha, memiliki seperangkat standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman aktivitas, dan memiliki tenant wirausaha di sekitar pesantren. Dalam perkembangannya, BLK-K masih memiliki tantangan berupa ketergantungan pada pendanaan dari pemerintah pusat, keterbatasan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industry, pengelolaan/manajemen BLK-K, kualitas pelatihan, kompetensi instruktur, pemilihan lokasi dan program kejuruan, serta masih adanya resisten terhadap perubahan. Namun demikian terdapat peluang yang dimanfaatkan oleh BLK-K diantaranya peningkatan kapasitas BLK-K, kolaborasi multipihak, serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

INTRODUCTION

Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK-K) merupakan lembaga profesional di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berkonsentrasi pada bidang pelatihan guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten dan kompetitif sesuai kebutuhan pasar kerja (<https://kelembagaan.kemnaker.go.id>). BLKK membekali tenaga kerja melalui pelatihan vokasi berbasis kompetensi untuk meningkatkan keterampilan dasar, keahlian teknis, maupun keahlian interpersonal (Maesyarah, 2017; Aulia, 2022). Selanjutnya Aulia (2022) menekankan bahwa BLKK tidak hanya meningkatkan keterampilan sumber daya manusia tetapi juga fokus pada peningkatan produktivitas kerja. Implementasi peran BLK-K

didukung dengan adanya fasilitas belajar, tenaga pengajar, kurikulum, serta metode pelatihan yang memungkinkan peserta pelatihan untuk memperoleh pengalaman yang komprehensif. BLK-K juga diharapkan menjadi tulang punggung untuk mencetak pekerja yang membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran, pada tahun 2023 masih terdapat 7,9 juta penduduk Indonesia yang pengangguran dari 146 juta penduduk angkatan kerja (Kompas, 2024).

Meskipun demikian, dalam proses menjalankan perannya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh BLK-K diantaranya adalah masih terdapat ketergantungan terutama pada pendanaan dari pemerintah (Risandi & Liana, 2023). Pemerintah memberikan bantuan kepada BLK-K dalam bentuk pendirian bangunan dan peralatan sesuai jenis pelatihan yang diusulkan. Pendanaan tersebut diberikan selama dua tahun yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pengelola dan instruktur BLK-K serta anggaran untuk menyelenggarakan paket pelatihan. Tata kelola BLK-K juga membutuhkan biaya yang besar untuk membiayai fasilitas tenaga pengajar, peralatan praktik, kurikulum, dan sertifikasi kompetensi (Kementerian Ketenagakerjaan, 2021). Data Bappenas (2022) menunjukkan bahwa 62,13 persen BLK-K masih belum mampu melakukan pembiayaan mandiri.

Secara umum, BLK-K masih menghadapi kesulitan untuk menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan atau lapangan kerja sesuai dengan bidang pelatihan yang didapatkan (Suryono, *et al.*, 2022). Hal ini disebabkan karena BLK-K belum mampu bekerjasama secara strategis untuk mengembangkan kurikulum yang terintegrasi dengan industri dan pemberi kerja (Risandi & Liana, 2023) sehingga alumni BLK-K masih kesulitan terserap ke dunia industri. Pada skala lokal, BLK-K juga belum mengoptimalkan kerjasama dengan pemerintah desa (Kementerian Ketenagakerjaan, 2021). Penelitian oleh Lembaga Riset Prakarsa (2020) menemukan bahwa hanya ada 15% BLK-K yang memiliki kemitraan strategis dengan industri/pemberi kerja dan baru 23% BLK-K memiliki kerjasama dengan pemerintah lokal. Fakta lain terkait dengan BLK-K adalah lokasi pembangunan BLK-K masih belum dekat dengan sentra kawasan industri (Kompas, 2023).

Untuk mengklasifikasikan BLK-K, Kemenaker membaginya ke dalam tiga tipologi yaitu klasifikasi BLK-K Mandiri, BLK-K Berkembang, BLK-K Tumbuh yang dinilai setiap tahun. Hingga tahun 2023 terdapat 4.282 BLK-K. Pada tahun 2022 terdapat 283 BLK-K Mandiri dan meningkat menjadi 444 BLK-K pada tahun 2023, adapun BLK-K-berkembang meningkat dari 876 menjadi 1.403 BLK-K, sedangkan BLK-K tumbuh terdapat 1.752 di tahun 2022 dan menjadi 1.910 di tahun 2023. Risandi dan Liana (2023) menegaskan bahwa BLK-K perlu mengembangkan kompetensinya dan membangun sisi entrepreneur serta pengalaman terkait dunia usaha dan industri. Oleh karenanya penting untuk mendorong BLK-K menjadi inkubator wirausaha sebagai langkah untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang lulusannya mampu menciptakan usaha mandiri yang menghasilkan produk barang/jasa. Upaya tersebut telah terus didorong oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Besar Percepatan Kesempatan Kerja (BBPKK) dengan Program Pendampingan BLK-K Menjadi Inkubator Wirausaha, salah satunya pada tahun 2024 di wilayah II yaitu meliputi 12 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan pendampingan oleh perguruan tinggi yaitu UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam pelaksanaannya, pengembangan BLK-K menjadi inkubator wirausaha masih dibayangi oleh berbagai tantangan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa setiap tantangan diiringi dengan peluang pengembangan melalui program tersebut.

Penting untuk mengidentifikasi karakteristik BLK-K di Wilayah II serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengembangkan BLK-K menjadi inkubator wirausaha.

Hal tersebut berimplikasi pada pilihan strategi pengembangan ke depan terutama untuk mencapai kemandirian BLK-K dan lahirnya wirausaha-wirausaha baru yang mandiri dan mampu menghasilkan produk/jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 3 aspek utama yaitu:

- 1) Bagaimana karakteristik BLKK di 12 kabupaten/kota dalam Lingkup Wilayah II di Jawa Barat?
- 2) Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh BLK-K di 12 kabupaten/kota dalam Lingkup Wilayah II di Jawa Barat dalam pengembangannya menjadi inkubator wirausaha?
- 3) Apa saja peluang yang dapat dimanfaatkan BLK-K di 12 kabupaten/kota dalam Lingkup Wilayah II di Jawa Barat dalam pengembangannya menjadi inkubator wirausaha?

Kajian Teoritis

Klasifikasi BLK-K

BLK-K dibagi menjadi 3 tipologi yaitu BLK-K Mandiri, BLK-K Berkembang, dan BLK-K tumbuh. Penentuan tipologi BLK-K tersebut dilaksanakan berdasarkan penilaian setiap tahun berdasarkan beberapa indikator yaitu: 1) tata kelola; 2) penyelenggaraan pelatihan; 3) kemitraan/stakeholder penempatan; wirausaha dan inkubasi kewirausahaan/*production training*.

Tabel 1. Klasifikasi BLK-K

BLK-K Mandiri	BLK-K Berkembang	BLK-K tumbuh
Memiliki pengelolaan kelembagaan	Memiliki pengelolaan kelembagaan	Memiliki pengelolaan kelembagaan
Mampu menyelenggarakan program pelatihan tepat waktu sesuai standar	Mampu menyelenggarakan program pelatihan tepat waktu sesuai standar	Mampu menyelenggarakan program pelatihan tepat waktu sesuai standar
Sudah Melakukan Kerjasama/MoU dengan Industri	Sudah Melakukan Kerjasama/MoU dengan Industri	
Mampu menciptakan usaha mandiri yang menghasilkan produk barang/jasa		

Sumber: Kementerian Tenaga Kerja (2024)

Modal Sosial BLK-K

Modal sosial berperan dalam menciptakan modal manusia (Colleman, 1988). Kemudian ditegaskan bahwa modal sosial memiliki sifat produktif yang mampu membantu seseorang atau kelompok orang untuk memperoleh keuntungan material dan mencapai keberhasilan lainnya secara optimal. Modal sosial mencakup sejumlah aspek dari struktur sosial dan memberi kemudahan bagi orang untuk melakukan sesuatu dalam kerangka struktur sosial. Pemanfaatan modal sosial dalam BLK-K melalui jaringan sosial yang menciptakan keterhubungan antar-pihak serta melalui BLK-K itu sendiri sebagai organisasi sosial yang menjadi alat untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat tiga pilar modal sosial menurut Coleman yaitu kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa kepercayaan dalam lingkungan sosial, pentingnya arus informasi yang lancar di dalam

struktur sosial untuk mendorong berkembangnya kegiatan dalam masyarakat, serta norma-norma yang harus ditaati dengan sanksi yang jelas dan efektif.

Kemudian, pemikir lainnya yang melahirkan gagasan tentang modal sosial adalah Putnam (1993), yang mendefinisikan sebagai ciri-ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan manfaat bersama. Modal sosial merupakan seperangkat hubungan horizontal antara orang-orang yang terdiri dari jaringan keterikatan sosial yang diatur oleh norma-norma dan menentukan produktivitas suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Ada dua hal yang merupakan asumsi dasar dari konsep model sosial, yakni adanya jaringan hubungan dengan norma-norma yang terkait, dan keduanya saling mendukung guna mencapai keberhasilan di bidang ekonomi bagi orang-orang yang termasuk dalam jaringan tersebut.

Implikasi konsep modal sosial untuk menangkap kondisi tantangan dan peluang BLK-K dalam pengembangannya menjadi inkubator wirausaha menjadi signifikan dengan tiga alasan. Pertama, adanya jaringan sosial yang memungkinkan terjadinya koordinasi dan komunikasi diantara sesama anggota masyarakat. Khususnya dalam BLK-K terkait dengan siapa saja pihak yang menjadi mitra kerjasama. Kedua, kepercayaan memiliki implikasi positif dalam pengembangan BLK-K, keterkaitan orang-orang atau pihak memiliki rasa saling percaya dalam suatu jaringan sosial BLK-K sehingga menguatkan norma-norma mengenai keharusan untuk saling mendukung. Ketiga, berbagai keberhasilan yang terjadi pada waktu sebelumnya yang terjadi dalam jaringan BLK-K akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama di waktu yang akan datang.

Community Readiness Model (CRM)

CRM dikembangkan oleh Plested, Edward, Thurman (2009) yang ditujukan untuk membantu komunitas dalam menilai kesiapan mereka untuk menangani isu-isu sosial tertentu. Terdapat 9 tahap dalam CRM yaitu *no awareness*, *denial/resistance*, *vague awareness*, *preplanning*, *preparation*, *initiation*, *stabilization*, *confirmation/expansion*, dan *high level of community ownership*. Masing-masing tahapan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. *Community Readiness Model (CRM)*

No	Tahapan	Keterangan
1	No Awareness	Masalah yang dihadapi/perubahan yang terjadi tidak diakui oleh komunitas atau pemimpin komunitas sebagai suatu masalah atau tidak disadari sebagai masalah. Akhirnya komunitas tidak memiliki motivasi untuk melakukan perbaikan terhadap masalah tersebut.
2	Denial/Resistance	Telah ada pengakuan dari beberapa anggota komunitas bahwa masalah yang terjadi menjadi bentuk kekhawatiran namun belum ada pengakuan bersama atas kekhawatiran tersebut. Komunitas cenderung menolak atau menentang ide untuk menghadapi masalah tersebut.
3	Vague Awareness	Komunitas masih belum siap untuk mengambil tindakan nyata terhadap masalah/kekhawatiran yang dirasakan (belum ada motivasi langsung).
4	Preplanning	Komunitas telah mulai mengidentifikasi kebutuhan dan memulai perencanaan awal, hanya upaya yang dilakukan belum fokus.

No	Tahapan	Keterangan
5	Preparation	Komunitas mulai mempersiapkan diri untuk mengambil tindakan nyata, dimana pemimpin mulai merencanakan perubahan dengan serius.
6	Initiation	Mulai ada aktivitas perubahan dengan informasi yang telah cukup tersedia
7	Stabilization	Komunitas telah mencapai level stabilitas yang memungkinkan untuk mempertahankan dan meningkatkan perubahan.
8	Confirmation/ Expansion	Komunitas telah memastikan bahwa upaya perubahan yang dilakukan telah berjalan efektif.
9	High Level of Community Ownership	Komunitas telah memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap upaya perubahan yang dilakukan, memiliki mekanisme evaluasi yang efektif dan memungkinkan pengembangan lebih lanjut.

Sumber: Plested, Edward, & Thurman (2009)

Konsep CRM ini membantu untuk memahami tantangan dan peluang BLK-K dalam pengembangannya menjadi inkubator wirausaha, terutama untuk melihat kesiapan BLK-K ketika berkembang menjadi inkubator wirausaha. Posisi BLK-K pada level CRM akan lebih mengarahkan analisis tantangan dan peluang sesuai dengan kondisi BLK-K.

METHOD

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan mix method yaitu melalui kombinasi antara metode kualitatif dan metode kuantitatif (Cresswell, 2009). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, survei, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan kepada pengurus BLK-K dari 12 kabupaten yang berasal dari 23 BLK-K dalam lingkup Program Pendampingan BLK-K Menjadi Inkubator Wirausaha Wilayah II, wawancara juga dilakukan kepada 8 pendamping BLK-K. Data juga dikumpulkan melalui survei kepada sejumlah 31 responden untuk mengumpulkan data kuantitatif terutama yang berkaitan dengan karakteristik dan kondisi BLK-K serta kesiapannya menjadi inkubator wirausaha. Selain itu analisis dokumen juga dilakukan seperti laporan kegiatan, kurikulum pelatihan, data statistik, serta profil BLK-K terlingkup program. Data yang diperoleh dianalisis melalui pengkodean data hasil wawancara dan analisis dokumen, serta data kuantitatif dianalisis melalui statistik deskriptif dengan pengukuran menggunakan skala likert untuk menggambarkan data hasil survei. Kedua analisis tersebut diintegrasikan sebagai gabungan temuan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang BLK-K di Wilayah II Jawa Barat.

RESULT AND DISCUSSION

Karakteristik BLK-K di 12 Kabupaten dalam Lingkup Wilayah II di Jawa Barat

Terdapat 23 BLK-K di Wilayah II Jawa Barat yang tergabung dalam Program Pendampingan BLK-K Menjadi Inkubator Wirausaha Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Besar Percepatan Kesempatan Kerja (BBPKK). BLK-K tersebut tersebar pada 12 kabupaten/kota yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Wilayah, Nama BLK-K, dan Bidang Usahanya

No	Kabupaten	Nama BLK-K	Bidang Usaha	Inkubator Wirausaha
1	Bandung	BLK-K Ar-Rahmat	Industri kreatif, teknologi informatika, pangan	V
2	Bandung Barat	BLK-K PP Al Hikmah Al AMiriyah	Teknologi, pangan, kriya, dan industri kreatif	V
		BLK-K PP Al-Mashduqiyah Cibalok	Desain mode dan tekstil (tata busana)	V
		BLK-K Daarut Taghyir	Industri kreatif, pangan, teknologi, dan kriya	V
3	Bogor	BLK-K Al-Minhaj Al-Islamy	Desain mode dan tekstil (bidang menjahit)	V
		BLK-K Visi Nusantara	Teknologi, Industri Kreatif, Pangan, dan Kriya	v
		BLK-K PP Cinta Rasul	Teknologi, Industri Kreatif, Pangan, dan Kriya	v
		BLKK PP As Syarofah	Teknologi, Industri Kreatif, Pangan, dan Kriya	V
		BLK-K Alhidayah Pasir Buncir	Bisnis Teknologi dan Industri Pangan	V
4	Ciamis	BLK-K Bangkit Mandiri	Teknologi, Industri Kreatif, Pangan, dan Kriya	V
5	Cirebon	BLK-K Al-Ma'rufiyah	Teknologi, Industri Kreatif, Pangan, dan Kriya	V
		BLK-K Hamalatidzikra	Teknologi, Industri Kreatif, Pangan, dan Kriya	V
		BLK-K Al-Manshuriyah	Teknologi, Industri Kreatif, Pangan, dan Kriya	V
6	Garut	BLK-K RIyadhul Huda	Teknologi, Industri Kreatif, Pangan, dan Kriya	V
		BLK-K Yayasan Al-Hijjaz	Teknologi dan Pangan	V
		BLK-K Al-Hadad	Teknologi, Industri Kreatif, Pangan, dan Kriya	V
		BLK-K PP Al Huda	Teknologi dan Kriya	V
7	Indramayu	BLK-K Fiddien Krangkeng	Teknologi, Industri Kreatif, Pangan	V
8	Karawang	BLK-K Nurul Falah Yaspin	Teknologi, Kriya, Pangan	V
9	Pangandaran	BLK-K Assabaq Mangunjaya	Teknologi, Industri Kreatif, Pangan, dan Kriya	V
10	Subang	BLK-K Minhajut Thalibin	Teknologi Informasi	V

No	Kabupaten	Nama BLK-K	Bidang Usaha	Inkubator Wirausaha
11	Tasikmalaya	BLK-K Al Firdaus Pasirparigi	Industri Kreatif	V
12	Kota Bogor	BLK-K PPST Al Um	Teknologi, Industri Kreatif, Pangan	V

Sumber: diolah dari data primer (2024)

Secara keseluruhan 23 BLK-K pada 12 kabupaten/kota di Wilayah II Jawa Barat telah berkembang menjadi inkubator wirausaha. Sebanyak 8,69 % menggeluti bidang usaha utama dalam bidang desain dan mode, kemudian 91,31% memiliki bidang usaha teknologi, industri kreatif, pangan, dan kriya. Pengembangan BLK-K menjadi inkubator wirausaha ditandai dengan terpenuhinya berbagai standar seperti kelayakan infrastruktur dan layanan, BLK-K telah memiliki rencana strategis inkubator (pendek, menengah, dan panjang), memiliki berbagai standar operasional prosedur (SOP) seperti SOP pendampingan, SOP penerimaan tenant, SOP kontrak kerjasama, SOP monitoring, SOP coaching, dan SOP strategi kelulusan tenant. Tujuan inkubator pada setiap BLK-K yang dicirikan dengan pengelolaan berbasis yayasan pesantren pada 23 BLK-K dalam penelitian ini sangat mendukung upaya penciptaan dan penyerapan tenaga kerja melalui wirausaha. Secara spesifik tujuannya adalah untuk meminimalisir kemiskinan di lingkungan pesantren.

Merujuk pada tipologi BLK-K Kementerian Ketenagakerjaan, 23 BLK-K di wilayah II Jawa Barat ini telah termasuk sebagai BLK-K Mandiri. Meskipun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, namun karakteristik 23 BLK-K telah mencirikan mampu menciptakan usaha mandiri yang menghasilkan produk barang/jasa melalui bidang usaha yang digeluti, selain itu adanya tenant juga menjadi ciri kemandirian BLK-K. Berdasarkan data survei yang menggambarkan bagaimana 23 BLK-K saat ini diperoleh gambaran disajikan Tabel 4.

Tabel 4. Gambaran Kesiapan BLK-K Mengembangkan Model Inkubator Wirausaha

Aspek	Skala
Kesiapan pendampingan BLK-K menjadi inkubator Wirausaha	3,75
Dukungan Infastruktur BLK-K menjadi inkubator wirausaha	3,37
Kemampuan manajemen BLK-K dalam pengelolaan inkubator wirausaha	3,62
Efektivitas Program Kejuruan BLK-K sebagai inkubator wirausaha	3,85
Dukungan mitra (pemerintah pusat, daerah, dan mitra industri)	3,85
Rata-Rata	3,69

Sumber: Data Primer (2024) – tidak perlu disebut!

Diukur menggunakan skala likert menggunakan kategori pengukuran 1-5 (1: Tidak siap, 2: Kurang Siap; 3: Cukup Siap, 4: Siap, 5: Sangat Siap) menunjukkan bahwa rata-rata kesiapan BLK-K di Wilayah II Jawa Barat berkembang menjadi inkubator wirausaha berada pada skala 3,69. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan BLK-K berada pada kategori cukup siap (3) dan siap (4). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum BLK-K Wilayah II Jawa Barat telah cukup siap untuk berkembang menjadi inkubator wirausaha dengan berbagai dukungan seperti kesiapan pendampingan, dukungan infrastrktur, kemampuan manajemen, efektivitas program kejuruan yang dimiilki, serta dukungan

mitra. Rata-rata nilai tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antar BLK-K di Wilayah II (tidak semua memiliki kesiapan yang sama). Namun demikian, angka rata-rata tersebut juga menunjukkan bahwa pengembangan BLK-K menjadi inkubator bisnis memiliki potensi pengembangan lebih lanjut dilihat dari angka yang mendekati kategori 4 (siap). Pengembangan yang dimaksud dapat berupa perluasan akses permodalan, jaringan bisnis, serta pendampingan berkelanjutan (Supriadi, 2024).

Data kesiapan yang dihasilkan dari survei secara spesifik menunjukkan bahwa aspek dukungan infrastruktur memiliki skala terendah diantara aspek lainnya (3,375), kemudian diikuti oleh aspek kemampuan manajemen (3,625), aspek kesiapan pendampingan (3,75). Pada aspek efektivitas program kejuruan memiliki skala 3,85 sama dengan aspek dukungan mitra terhadap BLK-K. Data ini memiliki signifikansi dengan rata-rata yang menunjukkan kesenjangan pada 23 BLK-K yang terlingkup program. Dukungan infrastruktur memiliki skala paling rendah, hal ini dimungkinkan terkait dengan kondisi letak/wilayah geografis BLK-K yang berbeda-beda, ada yang aksesnya mudah dan ada yang berada di wilayah pelosok kabupaten. Hal tersebut sangat erat hubungannya dengan pengadaan dan kualitas infrastruktur BLK-K juga keterjangkauannya. Aspek kemampuan manajemen juga menjadi poin penting dari pengembangan BLK-K menjadi inkubator wirausaha, manajemen BLK-K yang menyatu dengan mekanisme pengelolaan yayasan pesanteren di satu sisi menjadi keunggulan namun dari sisi profesionalitas pengelolaan usaha dapat menjadi bias manajemen. Adapun aspek kesiapan pendampingan memiliki implikasi penting dengan kondisi ketergantungan BLK-K pada program pemerintah terutama jika terkait dengan pendanaan. Sedangkan untuk kondisi bidang/kejuruan relatif memiliki skala yang cukup tinggi dibanding lainnya karena bidang tersebut sudah berjalan dan telah memiliki tenant, demikian juga dukungan program pengembangannya salah satunya didukung oleh Program Pendampingan dari Kemenaker melalui BBPCK dan bekerjasama dengan UIN Siber Syekh Nurjat Cirebon ini.

Karakteristik kesiapan BLK-K menjadi inkubator juga dinilai oleh pendamping program. Dari 23 BLKK yang didampingi, menurut pendamping program baru 37.5% yang sudah meyakinkan dan siap menjadi inkubator wirausaha yang mandiri, sisanya sebanyak 62,5% masih perlu terus untuk didampingi.

"Sebenarnya mereka mampu, tapi manajemen BLKK mereka kurang bagus. Sehingga mereka pun bekerja setengah setengah. Terlebih ketika ketuanya pun tidak memiliki semangat dan visi yang sama. Mereka yang bekerja kurang mendapatkan dukungan, sehingga motivasi mereka pun kurang optimal."

(M, Pendamping, wawancara September, 2024)

Pendapat pendamping tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan dari BLK-K dimana dalam menjalankan inkubator wirausaha, beberapa BLK-K belum memiliki pengalaman manajerial, menghadapi konsep baru, memiliki kebingungan terkait bagaimana mencari jejaring kerjasama dan proses membangun nota kesepahaman. Karakter ini harus ditangkap sebagai peluang. Berdasarkan konsep Community Readiness Model (CRM) oleh Plested, Edward, & Thurman (2009) karakteristik kondisi yang dihadapi oleh 23 BLK-K di Wilayah di Wilayah II Jawa Barat menggambarkan posisi berada di level 6 (*initiation*/inisiasi). Hal tersebut sejalan dengan hasil rata-rata kesiapan yang masih berproses antara akhir skala 3 dan mendekati skala 4. Level 6 atau tahap inisiasi ini menunjukkan bahwa 23 BLK-K di Wilayah II Jawa Barat telah memulai aktivitas perubahan yaitu pengembangan dari BLK-K menjadi inkubator wirausaha

berdasarkan informasi yang mereka peroleh dari Program Pendampingan Pendampingan dari Kemenaker melalui BBPKK dan bekerjasama dengan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Manifestasi dari pada tahapan inisiasi (level 6) tersebut terlihat pada beberapa aspek penting, seperti terdافتarnya BLK-K Inkubator Wilayah II di *Sipensi* (Sistem Informasi Penilaian Kinerja Lembaga Pelatihan) sebagai lembaga inkubator yang terverifikasi. Selain itu, upaya untuk mendaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) BLK-K di Kementerian Hukum dan HAM menandakan adanya langkah-langkah strategis yang signifikan dalam mengembangkan legitimasi dan keberlanjutan program inkubator wirausaha.

Tantangan Pengembangan BLK-K dalam Lingkup Wilayah Wilayah II Jawa Barat Dengan Mendirikan Inkubator Wirausaha

Tantangan pengembangan BLK-K melalui pendirian lembaga inkubator wirausaha dalam penelitian ini dianalisis merujuk pada konsep modal sosial oleh Putnam (1993). Analisis tantangan menggunakan konsep ini menjadi sangat relevan karena menggambarkan dinamika BLK-K sebagai organisasi sosial yang didalamnya memiliki tujuan dan kepentingan bersama yaitu untuk mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Modal sosial terdiri dari jaringan sosial, kepercayaan, serta norma sosial. Dalam konteks BLK-K Wilayah II Jawa Barat, jaringan sosial memiliki peran penting terutama terkait kerjasama industri dan pihak eksternal. Kepercayaan terkait dengan reputasi BLK-K baik dari kacamata peserta pelatihan maupun peserta eksternal. Adapun norma berkaitan dengan manajemen BLK-K, kompetensi, dan program kejuruan BLK-K. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini tantangan BLK-K dalam pengembangannya melalui pendirian lembaga inkubator wirausaha terdiri dari ketergantungan terhadap pendanaan pemerintah, keterbatasan kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), pengelolaan/manajemen BLK-K, kualitas pelatihan, kompetensi instruktur, pemilihan lokasi dan program kejuruan, serta resistensi terhadap perubahan. Secara rinci tantangan pengembangan BLK-K menjadi inkubator wirausaha disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Analisis Tantangan Pengembangan BLK-K Menjadi Inkubator Wirausaha

Aspek Tantangan	Analisis Berdasarkan Modal Sosial		
	Jaringan Sosial	Kepercayaan	Norma
Ketergantungan terhadap pendanaan pemerintah	BLK-K memiliki kecenderungan mengandalkan pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat dan berindikasi keterbatasan untuk membuka peluang pendanaan baru/pendanaan mandiri	BLK-K menghadapi isu kepercayaan dari pihak swasta (DUDI) terkait diversifikasi pendanaan	Fokus pendanaan terhadap sumber dana dari pemerintah menghambat inisiatif untuk mencari sumber pendanaan baru

Aspek Tantangan	Analisis Berdasarkan Modal Sosial		
	Jaringan Sosial	Kepercayaan	Norma
Keterbatasan kerjasama dengan DUDI	BLK-K masih kurang memanfaatkan potensi kolaborasi	Masih kurang informasi tentang kualitas BLK-K yang diperoleh pihak eksternal	Pola ketergantungan mengandalkan program pemerintah menghambat usaha proaktif untuk mencari mitra dari DUDI
Pengelolaan/Manajemen BLK-K	Masih lemahnya manajemen berimplikasi pada lemahnya koordinasi dengan mitra/calon mitra eksternal	Manajemen yang tidak efektif mengurangi kepercayaan dari pihak eksternal (baik peserta maupun mitra lainnya)	Masih kurangnya penerapan standar manajemen modern menghambat BLK-K untuk berkembang menjadi inkubator yang inovatif
Kualitas Pelatihan	Masih kurangnya kerjasama pelatihan dengan lembaga lain dan DUDI menyebabkan terhambatnya kualitas pelatihan	Kualitas pelatihan yang terhambat menyebabkan keraguan mitra	Metode pelatihan yang monoton menghambat inovasi dalam program pelatihan
Kompetensi Instruktur	Kurangnya kerjasama peningkatan kapasitas instruktur maupun kerjasama dengan lembaga lain serta DUDI untuk menyediakan instruktur profesional	Instruktur dengan kompetensi rendah mengurangi kepercayaan peserta terhadap pelatihan	Kelemahan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta industry menghambat peningkatan kompetensi instruktur
Pemilihan Lokasi dan Program Kejuruan	Masih kurangnya kerjasama dengan pemerinta daerah/desa, DUDI, dan dengan masyarakat lokal menyebabkan ketidaksesuaian pemilihan lokasi dan program kejuruan	Apabila program kurang relevan dengan kebutuhan lokal, serta pasar kerja, dan DUDI maka kepercayaan terhadap BLK-K menurun	Pemilihan lokasi dan program kejuruan yang tidak berbasis analisis kebutuhan mengurangi efektifitas BLK-K sebagai inkubator bisnis
Resistensi Terhadap Perubahan	Resistensi BLK-K terhadap berbagai perubahan menghambat pembaruan manajemen, metode, dan inovasi program	Kelemahan adaptasi terhadap perubahan mengurangi kepercayaan masyarakat dan mitra terhadap BLK-K	Norma yang masih mempertahankan status quo, mekanisme manajemen tradisional, menolak inovasi dapat membatasi perkembangan BLK-K.

Sumber: Data Primer (2024)

Peluang Pengembangan BLK-K dalam Lingkup Wilayah Wilayah II Jawa Barat Dalam Pendirian Lembaga Inkubator Wirausaha

Peluang pengembangan BLK-K menjadi pendirian Lembaga inkubator wirausaha dalam lingkup Wilayah II Jawa Barat dalam penelitian ini berhubungan erat dengan tantangan yang dihadapi. Peluang ini menjadi posisi strategis BLK-K dalam prosesnya berkembang sebagai inkubator wirausaha. Berdasarkan tantangan yang dihadapi, peluang BLK-K dapat dikelompokkan ke dalam 3 aspek utama yaitu pertama peningkatan kapasitas BLK-K baik dari segi manajemen, pendanaan, maupun kualitas pelatihan dan instruktur. Kedua, peluang dalam hal pengembangan kolaborasi multipihak yang sangat mungkin untuk direalisasikan dimana hal ini akan membuka peluang pendanaan lain selain dari pemerintah serta membuka ruang kerjasama dan jejaring dengan DUDI. Ketiga, peluang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat erat kaitannya dengan penguatan reputasi BLK-K sebagai inkubator wirausaha. Secara rinci analisis peluang berdasarkan modal sosial (Putnam, 1993) dituangkan sebagai berikut:

Tabel 6. Analisis Peluang Pengembangan BLK-K Menjadi Inkubator Wirausaha

Aspek Peluang	Analisis Berdasarkan Modal Sosial		
	Jaringan Sosial	Kepercayaan	Norma
Peningkatan Kapasitas BLK-K	Pengembangan Kapasitas BLK-K dapat diperkuat melalui kerjasama dan jejaring baik dengan lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi, juga dengan pemerintah, DUDI, maupun lembaga donor baik dari aspek manajerial, pendanaan, maupun kualitas pelatihan dan instruktur	Kepercayaan dari mitra eksternal mampu mempercepat mekanisme penyampaian pengetahuan, teknologi, maupun inovasi dalam meningkatkan kapasitas	Peningkatana kapasitas bergantung pada monitoring dan evaluasi BLK-K serta tindakan pengendalian dan tindaklanjutnya.
Kolaborasi Multipihak	Peluang kolaborasi multi pihak dnegan pemerintah, DUDI, perguruan tinggi, masyarakat dapat medorong BLK-K untuk menciptakan ekosistem kondusif yang mendukung pengembangan wirausaha	Kepercayaan mendorong terciptanya kolaborasi yang lebih efektif	BLK-K perlu mengembangkan mekanisme kerjasama multipihak, sudah terbuka melalui SOP kerjasama, tinggal ditindaklanjuti.
Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi membuka	Pemanfaatan media yang efektif dpaat meningkatkan kepercayaan publik	BLK-K dapat mengembangkan penggunaan teknologi pada mekanisme

peluang BLK-K untuk memperluas jaringan melalui media atau platform digital termasuk dalam mengadakan pelatihan, pengembangan wirausaha maupun komunikasi dengan mitra	maupun mitra terhadap BLK-K	manajemen pengelolaan dan pelatihan untuk meningkatkan daya saing
--	-----------------------------	---

CONCLUSION

Berdasarkan seluruh ulasan analisis yang telah disampaikan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 23 BLK-K yang berkembang sebagai inkubator wirausaha pada Wilayah II Jawa Barat dan tersebar ke dalam 12 Kabupaten Kota. Bidang usaha BLK-K mayoritas adalah bidang Teknologi, pangan, kriya, dan industri kreatif sebanyak 91,31% dan sisanya pada bidang desain dan mode (8,9%). Merujuk pada tipologi BLK-K Kemenaker, BLK-K yang berkembang melalui pendirian Lembaga inkubator wirausaha masuk pada tipologi BLK-K mandiri. Adapun dari aspek kesiapan, 23 BLK-K dalam penelitian ini termasuk dalam kategori cukup siap menuju ke arah siap sehingga berdasarkan level CRM berada pada tahap inisiasi (tahap 6) dimana telah dijalankan langkah perubahan berdasarkan informasi dari Program Program Pendampingan Pendampingan dari Kemenaker melalui BBPKK dan bekerjasama dengan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Manifestasi dari pada tahapan inisiasi (level 6) tersebut terlihat pada beberapa aspek penting, seperti terdapatnya BLK-K Inkubator Wilayah II di *Sipensi* (Sistem Informasi Penilaian Kinerja Lembaga Pelatihan) sebagai lembaga inkubator yang terverifikasi. Selain itu, upaya untuk mendaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) BLK-K di Kementerian Hukum dan HAM menandakan adanya langkah-langkah strategis yang signifikan dalam mengembangkan legitimasi dan keberlanjutan program inkubator wirausaha. Tantangan pengembangan BLK-K melalui pendirian inkubator wirausaha terdiri dari ketergantungan terhadap pendanaan pemerintah, keterbatasan kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), pengelolaan/manajemen BLK-K, kualitas pelatihan, kompetensi instruktur, pemilihan lokasi dan program kejuruan, serta resistensi terhadap perubahan. Peluang pengembangan BLK-K melalui pendirian inkubator wirausaha berupa peningkatan kapasitas BLK-K baik dari segi manajemen, pendanaan, maupun kualitas pelatihan dan instruktur. Peluang dalam hal pengembangan kolaborasi multipihak yang sangat mungkin untuk direalisasikan dimana hal ini akan membuka peluang pendanaan lain selain dari pemerintah serta membuka ruang kerjasama dan jejaring dengan DUDI, serta peluang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat erat kaitannya dengan penguatan reputasi BLK-K sebagai inkubator wirausaha. Saran bagi pengembangan BLK-K melalui pendirian lembaga inkubator wirausaha terutama difokuskan pada mekanisme implementasi kelembagaan inkubator wirausaha. Perlu penguatan kesiapan BLK-K dalam pengembangan inkubator wirausaha, dimana BLK-K yang sudah berada di tahap inisiasi dalam menjalankan langkah perubahan perlu di dorong ke level selanjutnya yaitu stabilisasi, ekspansi, hingga pada *high level of community ownership* untuk menjamin keberlanjutan inkubator wirausaha. Hal ini dapat difasilitasi dengan peningkatan kapasitas manajerial melalui

pelatihan khusus untuk pengelola BLK-K. BLK-K perlu membuka peluang untuk memperluas jejaring terutama dengan Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dan Industri untuk memperluas akses pasar kerja, transfer pengetahuan, teknologi, serta inovasi, serta membuka alternatif pendanaan yang berkelanjutan sehingga tidak tergantung hanya dengan program pemerintah. Hal ini dapat didorong melalui peningkatan kapasitas kepemimpinan BLK-K. BLK-K perlu memaksimalkan fungsi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, melalui peningkatan kapasitas pengelola terkait dengan teknologi digital, pengembangan platform e-learning untuk meningkatkan keterjangkauan program, serta melaksanakan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis digital agar lebih efisien dan efektif.

ACKNOWLEDGEMENT

Penelitian ini didukung dari pendanaan Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BBPKK) Bandung Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun 2024

REFERENCES

- Aulia, Khofifatul. (2022). Peran Balai Latihan Kerja Dalam Meningkatkan Keterampilan dan Produktivitas Guna Peningkatan Kesempatan Kerja Menurut Prespektif Ekonomi Islam: Studi Kasus UPTD BLK Kabupaten Demak. [Skripsi]. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Bappenas. (2022). Konsep Pembiayaan Mandiri BLK di Indonesia. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Colleman, James S. (1988). *Social Capital in the Creation of Human Capital*. American Journal of Sociology 94: S95-S120.
- Cresswell, J.W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2021). Peta Jalan Kemandirian Bala Latihan Kerja Komunitas (BLK-K) 2022-2024. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Kementarian Ketenagakerjaan. (2024). Laporan Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Kompas. (2023). Sebanyak 283 BLK Komunitas Dinilai Telah Mandiri. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/02/11/sebanyak-283-blk-komunitas-dinilai-telah-mandiri>, pada 29 September 2024.
- Kompas. (2024). Penganggur 7,9 Juta Jiwa, BLK Komunitas Menjadi Tulang Punggung Cetak Pekerja. Diakses Melalui <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/07/pengangguran-79-juta-jiwa-blk-komunitas-jadi-tulang-punggung-cetak-pekerja>, pada 29 September 2024.
- Maesyarah, Ami Ade. (2018). Analisis Efektivitas Peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kalianda). [Skripsi]. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
- Plested, B. A., Edwards, R. W., & Jumper-Thurman, P. (2009). *Community Readiness: A Handbook for Successful Change*. Fort Collins, CO: Tri-Ethnic Center for Prevention Research.
- Prakarsa. (2020). Aporan Evaluasi Balai Latihan Kerja (BLK-K) Angkatan 2017-2018. Jakarta: Prakarsa.

- Putnam, Robert. (1993). *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*. The American Prospect, 13 (Spring 1993): 35-42.
- Risandi, Linia Siska, & Damia Liana. (2023). Tantangan Balai Latihan Kerja Komunitas. Buletin APBN Vol. VIII. Ed. 20, Oktober 2023. Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Setjen DPR RI.
- Supriadi, Yedi. (2024). Kemnaker Transformasi BLK Komunitas Jadi Inkubator Wirausaha untuk Perluas Kesempatan Kerja. Diakses Melalui https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1138604431/kemnaker-transformasi-blk-komunitas-jadi-inkubator-wirausaha-untuk-perluas-kesempatan-kerja?page=all#google_vignette, 29 September 2024.
- Suryono, Ivan Lilin, Rita Parmawati, Rotua Yossina Warsida, Maryani, Roos Arafat Ahmad Yani. (2022). Efektivitas Balai Latihan Kerja Komunitas Dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja. *Jurnal Ketenagakerjaan Volume*, 17(1),